



# LAPORAN SEMESTER I

## PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023



**TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING  
KOTA DUMAI**

Jl. Pangeran Diponegoro, Sukajadi, Dumai  
Telp : 0765 439159  
Email : [dppkb@dumaikota.go.id](mailto:dppkb@dumaikota.go.id)  
Website : [dppkb@dumaikota.go.id](http://dppkb@dumaikota.go.id)



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI

DI SAHKAN PADA TANGGAL JUNI 2023

OLEH,

WALI KOTA DUMAI

SELAKU

KETUA TIM PENGARAH TPPS KOTA



DISUSUN OLEH,

KETUA TIM PELAKSANA TPPS

H. INDRA GUNAWAN, SIP, M.Si

WAKIL KETUA TPPS

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si

SEKRETARIS TPPS

ELYWARTY, SKM

BIDANG PELAYANAN  
INTERVENSI SENSITIF DAN  
SPESIFIK



1. SHINTIA RIZA, SKM, M.Si

BIDANG PERUBAHAN  
PERILAKU DAN  
PENDAMPINGAN  
KELUARGA



1. NELLY SUSANTI, SKM

BIDANG KOORDINASI DAN  
KONVERGENSI



1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si

BIDANG DATA,  
MONEV&KNOWLEDGE  
MANAGEMENT



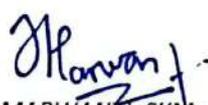
1. BOBI, ST



2. ELCHA SESTI, S.ST



2. UTERI NOVIDAR, S.ST



2. SRI MARWANTI, SKM, M.Si



2. MURNI RAHMADANI, S, KM, M.Si

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR .....	32
PROGRAM INOVASI DI KOTA DUMAI.....	43
LAMPIRAN .....	51

## KATA PENGANTAR

Pencapaian target pembangunan kesehatan melalui upaya percepatan penurunan stunting merupakan salah satu investasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Stunting bukan sekedar masalah perawakan tubuh yang pendek namun lebih dari itu, stunting merupakan hasil dari tidak adekuatnya asupan gizi yang terjadi secara berkepanjangan dan atau penyakit infeksi yang kronis dan berulang yang dampak jangka panjangnya dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui penguatan deteksi dini dan intervensi yang tepat baik intervensi spesifik maupun sensitif secara kolaboratif, kejadian stunting dapat dicegah. Pemerintah di semua level administrasi dengan dukungan dari semua program dan sektor serta mitra sangat berkomitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting. Konvergensi ini dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang dilaksanakan di pusat, provinsi kota/ kota bahkan sampai level desa/kelurahan.

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari *Double Burden Malnutrition (DBM)* mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

Percepatan penurunan stunting menjadi fokus dan prioritas bagi Pemerintah Kota Dumai, sebagaimana pilar pertama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini dilakukan semata-mata demi tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan stunting yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menetapkan target prevalensi stunting sebesar 14,0% pada tahun 2024.

Komitmen Pemerintah Kota Dumai juga diwujudkan dengan Surat Keputusan Walikota Kota Dumai Nomor : 441/279/2023 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Dumai, tanggal 04 Januari 2023 mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kota Dumai. Dalam pelaksanaan tugasnya tim percepatan penurunan stunting wajib menyampaikan laporan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sebagaimana juga diamanatkan dalam dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kota Dumai bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kota dan kecamatan.

Penyusunan laporan percepatan penurunan stunting semester I tahun 2023 sebagai bahan laporan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kota Dumai kepada kepala daerah dan ketua tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Provinsi Riau terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik berupa program kegiatan intervensi sensitive maupun intervensi spesifik. Laporan ini diharapkan juga sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai maupun Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kota Dumai akan mendapatkan arahan dan masukan guna pencapaian indikator target layanan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam serta senantiasa mengharap Ridho dari Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Esa laporan percepatan penurunan stunting semester I tahun 2023 tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kota Dumai telah selesai disusun. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta aktif memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini serta pelaksanaan program kegiatan percepatan penurunan stunting di Kota Dumai. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan

sebagai upaya kita untuk terus tumbuh lebih baik, karena kami menyadari percepatan penurunan stunting memerlukan kerja keras, kerja sama dan pemikiran kita bersama.

Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh tim percepatan penurunan stunting Kota Dumai yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dalam menjalankan tugas fungsi. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Dumai, Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI  
SELAKU KETUA TPPS  
KOTA DUMAI**

**H. INDRA GUNAWAN, SIP, M.Si**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **LAPORAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)**

### **KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023**

Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2030-2040, bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun keatas). Dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Momentum tersebut harus disikapi dengan menyiapkan desain pembangunan sumber daya manusia yang mapan. Investasi sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas adalah menjadi keniscayaan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah menetapkan Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) sebagai Program Prioritas Nasional yang masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Selanjutnya Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan menetapkan target percepatan penurunan *Stunting* 14 persen pada tahun 2024. Di dalam Perpres tersebut juga memberikan mandat kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksana di tingkat pusat. Menindaklanjuti mandat dari Perpres 72/2021 Kepala BKKBN mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) No. 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia. Kedua peraturan dimaksud adalah menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, daerah, desa dan kelurahan dalam melaksanakan percepatan penurunan *Stunting*, dimana telah ditetapkan sasaran intervensinya kepada 5 (lima) kelompok yakni remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak baduta dan balitas. Didalam kedua peraturan tersebut juga mengamanatkan lima tematik yang menjadi prioritas yakni penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*, pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, pendampingan calon pengantin/calon pasangan usia subur, surveillance keluarga berisiko *stunting* dan audit kasus *Stunting* (AKS).

Dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* ditetapkan 5 (lima) pilar percepatan penurunan stunting, yakni 1). peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota/kota, dan pemerintah desa; 2). peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; 3). peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota/kota, dan

pemerintah desa; 4). peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan 5). penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

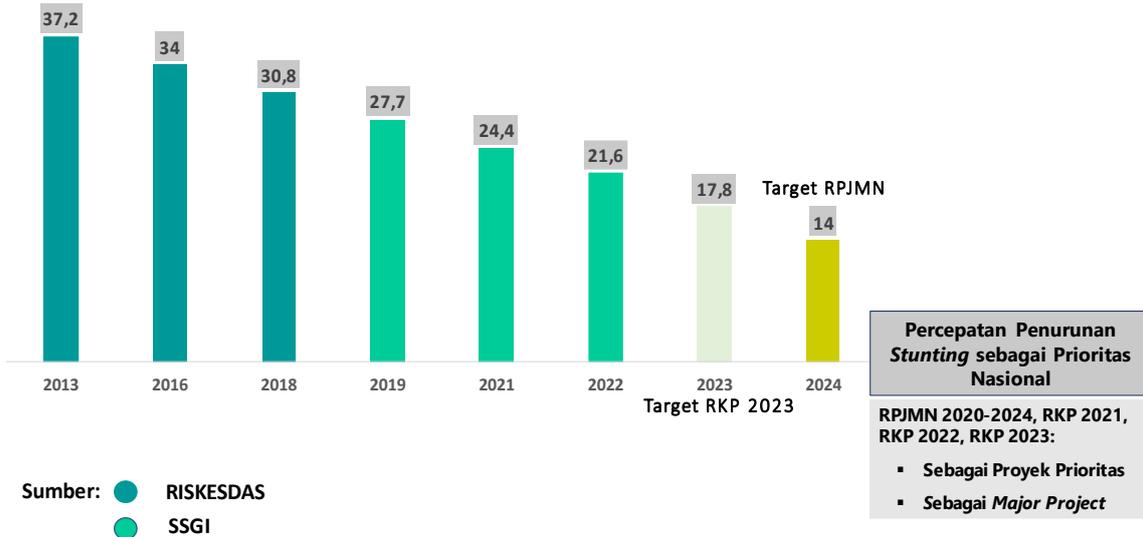
#### **A. Gambaran Prevalensi *Stunting* Kota Dumai**

Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi *Stunting* di Kota Dumai sebesar 12,8 persen, dimana bisa menurunkan 10,20 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yakni 23 persen. Target capaian prevalensi *Stunting* Kota Dumai tahun 2024 adalah 13 persen, Dari target capaian prevalensi *Stunting*, Kota Dumai telah melampaui target capaian dari Pusat namun hal tersebut tidak menjadikan Pemerintahan Kota Dumai lengah malah harus mempertahankan bahkan harus bisa menurunkan lagi dari target pusat dibawah 13 persen pada tahun 2024.. Memperhatikan waktu yang tinggal tersisa 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Kota Dumai melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) harus bekerja keras sebagaimana arahan Walikota pada saat Rembug *Stunting* Kota pada tahun 2023. Prevalensi *stunting* di kota/Kota berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 dan 2021 lebih banyak yang mengalami penurunan. Dari 12 (dua belas) kota kota, 9 (Sembilan) kota/kota prevalensi *Stunting*-nya menurun, dan Kota Dumai adalah salah satu kota yang masuk dalam prevalensi *Stunting*-nya menurun . Berikut ini prevalensi *Stunting* di Kota Dumai tahun 2018 – 2022 berdasarkan hasil Riskesdas dan SSGI.

Prevalensi Stunting Kota Dumai			
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022
17,3%	11,59%	23%	12,8%



## PREVALENSI STUNTING NASIONAL



## PREVALENSI STUNTING PROVINSI RIAU TAHUN 2022



Kota Dumai berhasil menurunkan angka prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 10,2% dari 23% menjadi 12,8%.

## B. GAMBARAN SEBARAN KELURAHAN LOKUS 2021 – 2024

2022	2023	2024
6 Kelurahan	10 Kelurahan	6 Kelurahan

## 1. Kelurahan Lokus Tahun 2022

Keputusan walikota Dumai Nomor 139 tahun 2021 tentang kelurahan lokasi fokus intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Kota Dumai tahun 2021- 2022 ditetapkan :

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Kampung Baru	Bukit Kapur
2	Bukit Kayu Kapur	Bukit Kapur
3	Simpang Tetap Darul Ihsan	Dumai Barat
4	Purnama	Dumai Barat
5	Bagan Keladi	Dumai Barat
6	Pangkalan Sesai	Dumai Barat

## 2. Kelurahan Lokus Tahun 2023

Menimbang bahwa Penanganan stunting merupakan tugas bersama yang sangat penting untuk dilakukan, maka lokus di perluas agar aksi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting lebih maksimal berdasarkan keputusan walikota Dumai nomor 440/308/2022 tentang kelurahan lokasi fokus intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Kota Dumai tahun 2023 ditetapkan :

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Simpang Tetap Darul Ihsan	Dumai Barat
2	Purnama	Dumai Barat
3	Bagan Keladi	Dumai Barat
4	Teluk Binjai	Dumai Timur
5	Jaya Mukti	Dumai Timur
6	Bagan Besar	Bukit Kapur
7	Bukit Kayu Kapur	Bukit Kapur
8	Teluk Makmur	Medang Kampai
9	Guntung	Medang Kampai

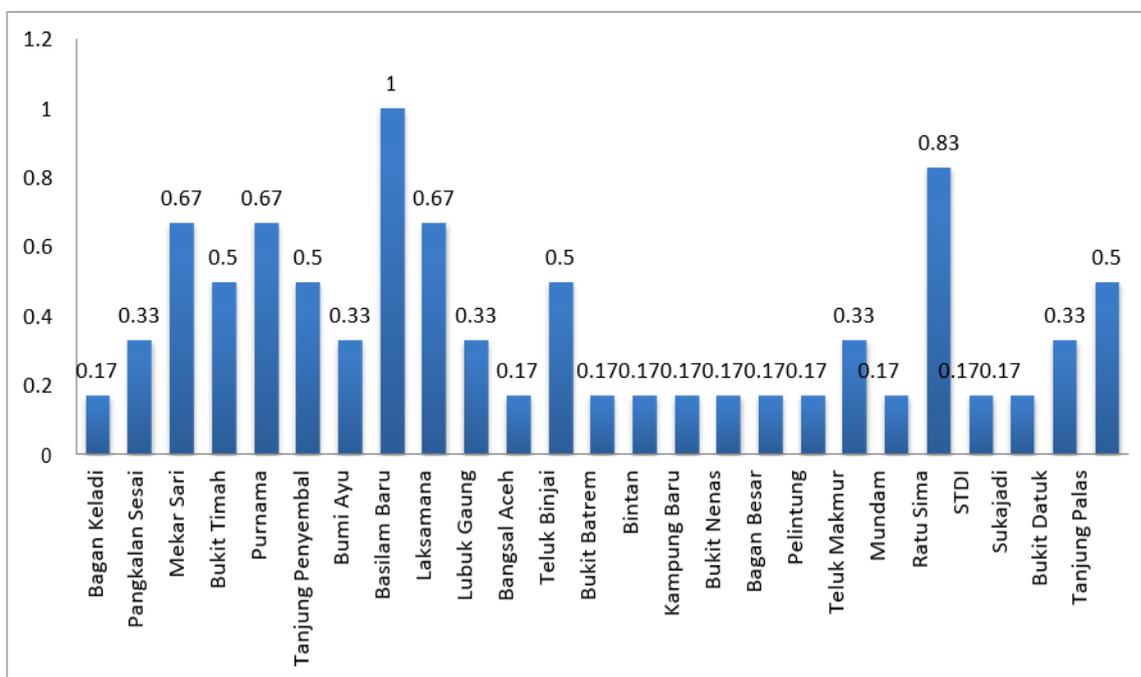
<b>10</b>	Basilam Baru	Sungai Sembilan
-----------	--------------	-----------------

3. Kelurahan Lokus Tahun 2024

Berdasarkan draf Keputusan walikota Dumai tentang kelurahan lokasi fokus intervensi pencegahan dan penurunan stunting di Kota Dumai tahun 2024 ditetapkan :

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
<b>1</b>	Pangkalan Sesai	Dumai Barat
<b>2</b>	Purnama	Dumai Barat
<b>3</b>	Simpang Tetap Darul Ichsan	Dumai Barat
<b>4</b>	Teluk Binjai	Dumai Timur
<b>5</b>	Bukit Kayu Kapur	Bukit Kapur
<b>6</b>	Basilam Baru	Sungai Sembilan

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 prevalensi balita stunting Kota Dumai 12.8 % mengalami penurunan jika dibandingkan hasil SSGI tahun 2021 yaitu 23%. Berikut sebaran balita stunting Kota Dumai per Kelurahan.

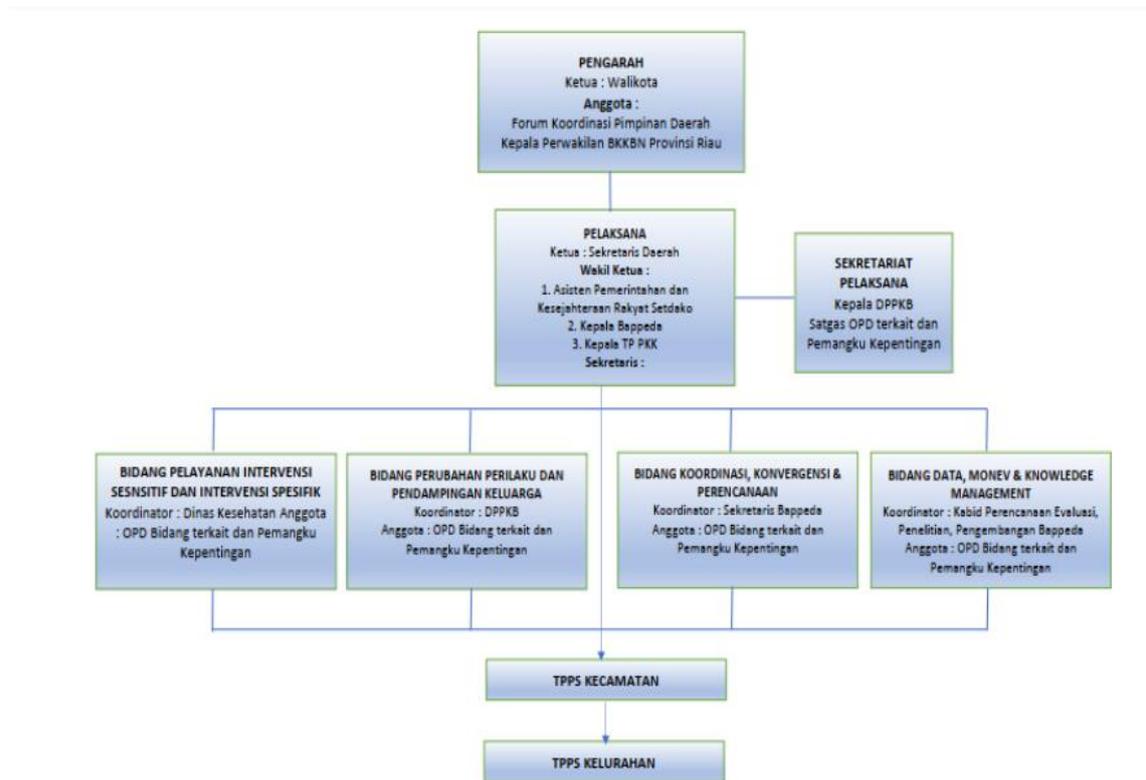


**C. Kelembagaan TPPS Kota Dumai**

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Dumai telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Dumai Nomor 444/279/2023 tanggal 04 Januari 2023 Tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Dumai. Beberapa hal yang dituangkan dalam keputusan tersebut yaitu mengenai struktur TPPS Kota Dumai dan

rincian tugas TPPS. Adapun struktur TPPS Kota Dumai secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

### Struktur TPPS Kota Dumai



Dalam tim percepatan penurunan stunting Kota Dumai terdapat beberapa bidang, Walikota Kota Dumai dalam TPPS sebagai Ketua Pengarah dan Wakil Walikota sebagai Ketua Pelaksana. Adapun tugas masing masing dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai adalah sebagai berikut :

#### ➤ Tim Pengarah

1. Memberikan pembinaan dan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kota;
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting ditingkat kota;
3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu bila diperlukan
4. Melaporkan penyelenggaraan penurunan stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu bila diperlukan

➤ **Ketua Pelaksana**

Mengekoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting kota melalui :

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting ditingkat kota, kecamatan dan Desa/kelurahan
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja diseluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS tingkat kota
5. Memimpin rembuk stunting kota 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu waktu bila diperlukan

➤ **Wakil Ketua Pelaksana**

1. Melaksanakan tugas tugas ketua pelaksana apabila berhalangan
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan

➤ **Sekretaris Pelaksana**

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan
2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi
3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS dibidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat rapat
4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang
5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kota
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kota

➤ **Sekretariat Pelaksana**

1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting
2. Melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting
3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan stunting

➤ **Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik**

Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting.

1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko stunting mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting
2. Mengkoordinasikan surveilans keluarga beresiko stunting dikota
3. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga beresiko stunting dikota
4. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting dikota
5. Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif satu kali dalam satu bulan

➤ **Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga**

1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di kota secara berkelanjutan;
3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kota;

5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

➤ **Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan**

1. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;
2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kota;
3. Melaksanakan rembuk stunting ditingkat kota;
4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting ditingkat kota;
7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, konvergensi dan perencanaan satu kali dalam satu bulan atau sewaktu waktu bila diperlukan

➤ **Bidang Data Monev & Knowledge Management**

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan stunting nasional yang ada di kota, seperti e- HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kota;
3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kota;
4. Melaksanakan audit stunting di kota;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan Desa dengan mengacu pada indikator kinerja

capaian operasionalisasi percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional.

## **2.2 Tugas Pokok dan Fungsi TPPS Kota Dumai**

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting tingkat nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dibentuk TPPS. Penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat pusat, provinsi, kota/kota dan desa/kelurahan, gubernur, Walikota/walikota, kepala desa/lurah menetapkan TPPS pada tingkatan dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting di kota menjadi tanggung jawab Walikota yang mendelegasikan tugas tersebut kepada Sekretaris Daerah dan membentuk TPPS kota dalam rangka melaksanakan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi percepatan penurunan stunting di tingkat kota.

Kota Dumai sebagaimana Surat Keputusan Walikota Kota Dumai Nomor : 444/279/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Dumai, tanggal 04 Januari 2023 mendelegasikan tugas tersebut kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TPPS Kota Dumai. TPPS Kota Dumai melaksanakan tugas percepatan penurunan stunting, antara lain:

1. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
3. Menyenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kota;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan

7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### D. Kegiatan TPPS Kota Dumai

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Dumai yang terbentuk tahun 2023, telah berupaya mengawal penyelenggaraan percepatan penurunan stunting melalui sejumlah kegiatan yang berupa rapat koordinasi dan kegiatan teknis lainnya. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan TPPS ada yang dikordinir oleh Bidang ada juga yang bersifat pleno. Berikut ini diinformasikan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh TPPS Kota Dumai:

No	Rencana Kerja	Jumlah	Status
1	Rembuk Stunting Kota	1 Kali	Sudah Terlaksana
2	Rembuk Stunting Kecamatan	7 kali	7 kali Sudah terlaksana
3	Mini Lokakarya Kecamatan	70 kali	21 kali terlaksana
4	Audit Kasus Stunting	2 kali	1 kali terlaksana
5	Desiminasi Audit Kasus Stunting	2 kali	1 kali terlaksana
6	Rapat Koordinasi TPPS	6 kali	6 kali terlaksana
7	Rapar Koordinasi BAAS	Jika diperlukan	Belum Terlaksana
8	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	7 Kecamatan	Sudah terlaksana
9	Pembinaan Tim Pendamping Keluarga	1 kali	Sudah terlaksana
10	Bantuan Sosial Beresiko Stunting	12 kali	6 terlaksana
11	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting	1 Kali	Sudah terlaksana
12	Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	1 Kali	Sudah Terlaksana
13	Rembuk Stunting Kelurahan	36 Kelurahan	Sudah Terlaksana

14	Pembentukan TPPS Tingkat Kecamatan	1 Kali	Sudah terlaksana
15	Pembentukan TPPS Tingkat Kelurahan	1 Kali	Sudah terlaksana
16	Gebyar Audit Kasus <i>Stunting</i> Kota Dumai	1 kali	Sudah terlaksana
17	Roadshow Menko PMK dalam Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Kota Dumai	1 kali	Sudah terlaksana
18	Penilaian Kinerja 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting kota/kota	1 kali	Sudah terlaksana
19	TOT Pendampingan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	1 kali	Sudah terlaksana
20	Penguatan TPPS dan Penyusunan Laporan TPPS kota/kota Semester 1 tahun 2023	1 kali	Sudah terlaksana
21	Pelaksanaan forum kooordinasi percepatan penurunan stunting Kota Dumai	1 kali	Sudah terlaksana
22	Pemantauan pelaksanaan CSR pihak swasta	Sesuai kebutuhan	Proses pelaksanaan
23	Koordinasi dan fasilitasi bapak asuh anak stunting	Sesuai kebutuhan	Proses pelaksanaan
24	Pemantauan pelaksanaan program pemberian makanan berbasis lokal	14 puskesmas	Proses pelaksanaan
25	Pelaksanaan bimbingan perkawinan bekerjasama dengan Depag	Sesuai Kebutuhan	Proses pelaksanaan

#### **E. Dukungan Kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting:**

1. Surat Keputusan Walikota Kota Dumai Nomor : 444/279/2023 Tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2023
2. Keputusan Walikota Kota Dumai Nomor 111 Tahun 2022, Tentang Peran Kelurahan dan Kepenghuluan dalam konvergensi penurunan stunting terintegrasi di Kota Dumai
3. Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Se-Kota Dumai
4. Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tim Audit Kasus Stunting Kota Dumai

**F. Capaian Indikator Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai Semester 1 Tahun 2023**

Pada capaian indikator baik peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) No. 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia, beberapa capaian masih terdapat capaian yang 0% dan N/A serta belum tercapai secara maksimal yang dikarenakan data dari OPD terkait belum tersedia, belum terealisasinya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan pelaporan/pencatatan yang masih harus diperbaiki. Harapannya untuk capaian semester 2 dapat dimaksimalkan kegiatan percepatan penurunan stunting baik ditingkat kota, kecamatan maupun kepenghuluan/kelurahan. Adapun capaian indikator untuk periode semester 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

No.	INDIKATOR	DENOMINATOR/SASARAN		NUMERATOR/CAPAIAN		CAKUPAN (%)
I.	Blok 1 : Capaian Perpres Lampiran A					
I.A.	Blok 1A : Indikator Intervensi Spesifik					
1	Indikator 1 : Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah Ibu Hamil yang diukur	138	Jumlah ibu hamil KEK yang menerima tambahan asupan gizi	138	100%
2	Indikator 2 : Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Jumlah Ibu Hamil	9590	Jumlah ibu hamil yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan	3082	32%
3	Indikator 3 : Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah remaja putri	15026	Jumlah remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	12561	84%
4	Indikator 4 : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Jumlah Baduta Usia 0-6 Bulan	2321	Jumlah Baduta 0-6 yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	1023	44%
5	Indikator 5 : Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Jumlah baduta usia 6 – 23 bulan	6258	Jumlah baduta usia 6 – 23 bulan yang mendapatkan MP-ASI	6258	100%
6	Indikator 6 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Jumlah Balita Gizi buruk 0-59 bulan	6	Jumlah Gizi buruk pada bayi 0-59 bulan yang mendapat tata laksana	6	100%
7	Indikator 7 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Jumlah Balita usia 0-59 bulan	22465	Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	16729	74%
8	Indikator 8 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Jumlah anak usia 6-59 bulan	93	Jumlah anak usia 6-59 bulan gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	93	100%
9	Indikator 9 : Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Jumlah anak usia 0-11 bulan	8718	Jumlah balita yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	3140	36%
I.B.	Blok 1B : Intervensi Sensitif					
1	Indikator 1 : Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	Jumlah persalinan	4853	Jumlah peserta KB pasca persalinan	778	16%
2	Indikator 2 : Persentase kehamilan yang tidak	Jumlah Ibu Hamil	1053	Jumlah kehamilan yang tidak diinginkan	116	11%

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

	diinginkan					
3	Indikator 3 : Cakupan calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Jumlah calon pengantin (Catin)	561	Jumlah catin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	561	100%
4	Indikator 4 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Jumlah rumah tangga	12855	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	318	2%
5	Indikator 5 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas	Jumlah rumah tangga	12855	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	5784	45%
6	Indikator 6 : Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan	Jumlah keluarga miskin dan tidak mampu (Desil 1-4) dengan iuran JKN dibayarkan oleh pemerintah pusat dan daerah	135761		95576	70%
7	Indikator 7 : Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	12855	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	4196	33%
8	Indikator 8 : Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Jumlah Keluarga miskin memperoleh bantuan tunai melalui PKH (Program Keluarga Harapan)	139644	Jumlah Keluarga miskin memperoleh bantuan tunai melalui PKH (Program Keluarga Harapan) dan jumlah masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS	7784	6%
9	Indikator 9 : Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas	Jumlah keluarga dengan balita, calon pengantin/PUS, remaja putri, ibu hamil hingga pasca salin dan ibu menyusui	12855	Jumlah keluarga dengan balita, calon pengantin/PUS, remaja putri, ibu hamil hingga pasca salin dan ibu menyusui yang mendapatkan pendampingan konseling dari tim TPK	4196	33%
10	Indikator 10 : Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	139644		12186	9%
11	Indikator 11 : Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF)	30	83%
II.	Blok 2 : Capaian Perpres Lampiran B					
II.A	Blok 2A : Indikator Pilar 1					

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

2	Indikator 2 : Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota	Apakah terselenggara rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota?	Ya	Jumlah rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	6 Kali	
3	Indikator 3 : Terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan	Apakah terselenggara rembug Stunting tingkat kecamatan?	Ya	Jumlah penyelenggaraan rembug Stunting tingkat kecamatan	7 Kecamatan	
4	Indikator 4 : Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting	Apakah tersedia kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan Stunting?	Ya		Ya	
5	Indikator 5 : Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah Desa yang memiliki bidan desa	35	97%
6	Indikator 6 : Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting	3	8%
8	Indikator 8 : Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Apakah Pemerintah Daerah kabupaten/kota meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting?	Ya		Ya	
9	Indikator 9 : Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting	36	100%
10	Indikator 10 : Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Jumlah pendamping PKH mengikuti pelatihan secara kumulatif hingga tahun berjalan	24		22	92%
11	Indikator 11 : Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota	36	100%
II.B	Blok 2B : Indikator Pilar 2					
1	Indikator 1 : Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	Apakah terlaksana kampanye nasional pencegahan Stunting?	Ya	Jumlah pelaksanaan kampanye nasional pencegahan Stunting	2 KALI	

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

2	Indikator 2 : Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Jumlah keluarga terdata	100336	Jumlah keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	81184	81%
3	Indikator 3 : Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah keluarga terdata	100336	Jumlah keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	2722	3%
6	Indikator 6 : Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting	17	47%
7	Indikator 7 : Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Jumlah Lembaga PAUD terdaftar	111	Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	102	92%
8	Indikator 8 : Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Apakah dilakukan penguatan kapasitas posyandu dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting?	Ya	Ya		
9	Indikator 9 : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	16	44%
10	Indikator 10 : Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	7784	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mengikuti P2K2 dengan modul kesehatan dan Gizi keluarga	5972	77%
11	Indikator 11 : Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR)	48	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	23	48%
12	Indikator 12 : Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama	Apakah terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama?	Ya	Ya		
13	Indikator 13 : Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting	Jumlah catin	300	Jumlah catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	125	42%

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

II.C	Blok 2C : Indikator Pilar 3					
1	Indikator 1 : Jumlah kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Apakah kabupaten/kota mengintegrasikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang?	Ya		Ya	
2	Indikator 2 : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Apakah kabupaten/kota melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting?	Ya		Ya	
3	Indikator 3 : Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah Desa/Kelurahan urahan mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (RPJMDes, RKPDes, APBDDes,RKA Desa)	36	100%
4	Indikator 4 : Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	36	100%
5	Indikator 5 : Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis,cakupan dan kualitas intervensi gizi bagi sasaran keluarga beresiko stunting	36	100%
6	Indikator 6 : Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	30	83%

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

7	Indikator 7 : Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah Calon Pengantin	561	Jumlah Calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah	561	100%
14	Indikator 14 : Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	Apakah kabupaten/kota mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting?	Ya		Ya	
15	Indikator 15 : Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	Apakah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting?	Ya		Ya	
16	Indikator 16 : Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting	Jumlah keluarga berisiko stunting	12855	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan	4196	33%
17	Indikator 17 : Cakupan calon pengantin yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah	Jumlah calon pengantin	561	Jumlah calon pengantin yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah	561	100%
18	Indikator 18 : Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Jumlah remaja putri	15026	Jumlah remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	0	0%
19	Indikator 19 : Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting	Apakah tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting?	Ya		Ya	
20	Indikator 20 : Persentase kabupaten/kota dengan Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Angka Age Spesific Fertility Rate /ASFR (15-19) kabupaten/kota	6/77 KELAHIRAN/12 593 WUS		$=\frac{(77/12593)}{*1000}$	6%
21	Indikator 21 : Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Jumlah pelayanan keluarga berencana	4853	Jumlah pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	778	16%
22	Indikator 22 : Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana	Jumlah seluruh PUS	45381	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB	6595	15%

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

II.D	Blok 2D : Indikator Pilar 4					
1	Indikator 1 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	12855	Jumlah keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	250	2%
2	Indikator 2 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Jumlah keluarga berisiko stunting	12855	Jumlah keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	100	1%
3	Indikator 3 : Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MPASI)	Jumlah KPM (Ibu Hamil, Menyusui dan Baduta)	7784	Jumlah KPM (Ibu Hamil, Menyusui dan Baduta) yang mendapat program selain Program Sembako	310	4%
4	Indikator 4 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Jumlah PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	83899	Jumlah PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	4357	5%
5	Indikator 5 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	83899	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima BPNT	7681	9%
6	Indikator 6 : Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan nasional	96777	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	83889	87%
7	Indikator 7 : Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha.	Jumlah pelaku usaha pangan fortifikasi		Jumlah Pelaku usaha pangan fortifikasi yang menindaklanjuti rekomendasi dari Pemda		#DIV/0!
II.E	Blok 2E : Indikator Pilar 5					
3	Indikator 3 : Publikasi data Stunting tingkat kabupaten/kota.	Apakah dilakukan publikasi data Stunting di tingkat kabupaten/kota?	Ya		Ya	

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

6	Indikator 6 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Apakah terselenggara Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota?	Ya	Jumlah penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Daerah kabupaten/kota	2 Kali	
7	Indikator 7 : Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa.	Jumlah penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa	36		36	
8	Indikator 8 : Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting.	Apakah terselenggara audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting?	Ya	Jumlah penyelenggaraan audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	26	
11	Indikator 11 : Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Apakah tersedia data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)?	Ya		100	
13	Indikator 13 : Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	Apakah kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting	Ya		Ya	
15	Indikator 15 : Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Apakah kabupaten/kota menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi?	Tidak		Tidak	
III.	Blok 3 : Capaian RAN PASTI					
III. A.	Blok 3A : Indikator RAN PASTI Kluster Manajerial					
1	Indikator 1 : Persentase kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	Apakah kabupaten/kota meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya?	Ya		Ya	

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

2	Indikator 2 : Persentase kabupaten/kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif	Apakah kabupaten/kota mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif?	Ya		Ya	
3	Indikator 3 : Persentase kabupaten/kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	Apakah ada temuan dari hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting	Tidak		Tidak	
4	Indikator 4 : Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi APBDes minimal 10% untuk Percepatan Penurunan Stunting dari tahun sebelumnya	36	100%
III. B.	Blok 3B : Indikator RAN PASTI Kluster Operasional					
1	Indikator 1 : Persentase desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang TPK nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan	36	100%
2	Indikator 2 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar	Jumlah keluarga berisiko stunting	12855	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar	4196	33%
3	Indikator 3 : Cakupan catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah	Jumlah catin	561	Jumlah catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah	561	100%
4	Indikator 4 : Persentase kab/kota yang memiliki tim audit Stunting	Apakah kabupaten/kota memiliki tim audit Stunting?	Ya		Ya	
5	Indikator 5 : Persentase pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun	Jumlah pelaksanaan audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	2		1	50%
6	Indikator 6 : Persentase tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun	Jumlah tindak lanjut hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga	2		1	50%
7	Indikator 7 : Persentase diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen pendampingan keluarga 2	Jumlah diseminasi hasil audit kasus Stunting dan manajemen	2		0	0%

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

	kali dalam setahun	pendampingan keluarga				
9	Indikator 9 : Cakupan keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial	Jumlah keluarga prasejahtera berisiko Stunting	139644	Jumlah keluarga prasejahtera berisiko Stunting penerima bantuan sosial	12186	9%
10	Indikator 10 : Persentase catin anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD)	Jumlah catin anemia	4	Jumlah catin anemia yang mengonsumsi 90 tablet tambah darah (TTD)	4	100%
11	Indikator 11 : Persentase catin yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.	Jumlah catin	561	Jumlah catin yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	561	100%
12	Indikator 12 : Persentase Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana kesehatan	Jumlah Ibu hamil PJT	0	Jumlah Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana	0	0%
13	Indikator 13 : Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan	Jumlah Ibu hamil	3051	Jumlah ibu hamil yang menerima pendampingan	1701	56%
15	Indikator 15 : Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang gizi buruk	3	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk	3	100%
16	Indikator 16 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang memiliki rumah layak huni	Jumlah keluarga berisiko stunting	12855	Jumlah keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni	59	0%
17	Indikator 17 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai jamban sehat	Jumlah keluarga berisiko stunting	12855	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mempunyai jamban sehat	3780	29%
18	Indikator 18 : Persentase keluarga berisiko Stunting yang mempunyai air minum layak	Jumlah keluarga berisiko stunting	12855	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mengakses air minum layak	981	8%
20	Indikator 20 : Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram	41	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	41	100%
21	Indikator 21 : Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm	NA	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi	NA	#VALUE!
22	Indikator 22 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis	17	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	17	100%

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

23	Indikator 23 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	6756	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan	1594	24%
24	Indikator 24 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-6 bulan	2312	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	1023	44%
25	Indikator 25 : Persentase desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK	Jumlah desa/kelurahan	36	Jumlah desa/kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK	36	100%
26	Indikator 26 : Persentase TPK yang mendapatkan orientasi	Jumlah TPK	432	Jumlah TPK yang mendapatkan orientasi	432	100%
28	Indikator 28 : Persentase anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	26	Jumlah anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan	26	100%
29	Indikator 29 : Persentase Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	Jumlah Balita 0-23 bulan	7878	Jumlah Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	7848	99,6%
30	Indikator 30 : Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	Jumlah Balita 0-23 bulan	7878	Jumlah Balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	2330	29,6%
31	Indikator 31 : Persentase Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	Jumlah Balita 0-59 bulan	22645	Jumlah Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard	18969	83,8%
32	Indikator 32 : Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	Jumlah Balita 0-59 bulan	22645	Jumlah Balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard	16729	73,9%
33	Indikator 33 : Persentase desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal	Jumlah desa prioritas	7	Jumlah desa prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal	7	100%
35	Indikator 35 : Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang	30	Jumlah keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	30	100%

## **STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR**

Program percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, serta intervensi dukungan teknis (enabling factors), melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara perangkat daerah, dan non perangkat daerah. Intervensi-intervensi dimaksud dilaksanakan dengan menyasar kelompok sasaran prioritas, yakni bayi 0-24 bulan, ibu hamil dan ibu menyusui, serta sasaran penting lainnya (a.l. Remaja putri, calon pengantin, dan balita), terutama di lokasi prioritas yang memiliki prevalensi stunting relatif tinggi.

Dalam konteks Rencana kegiatan, yang dimaksud Rencana kegiatan stunting adalah Rencana kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting, yaitu: a) Rencana kegiatan Spesifik, anggaran yang digunakan untuk Intervensi Langsung; b) Rencana kegiatan Sensitif, anggaran prioritas lain yang berkontribusi terhadap penurunan stunting, c) Tidak Bersifat Subsitusi, anggaran sensitif tidak bisa dialihkan keanggaran spesifik, begitu pula sebaliknya, dan; c) Berdasarkan Proses Tagging, anggaran dihitung berdasarkan prosetagging (penandaan) keluaran (rincian output) dari Renja. Analisis pada level output berpotensi overestimate mengingat alokasi di tingkat output tersebut ada kalanya tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk penurunan stunting, melainkan digunakan juga untuk mendukung program lainnya. Level analisis lanjutan dilaksanakan melalui pendekatan memetakan anggaran level sub- rincian output (RO)/uraian kegiatan /detil yang mendukung penurunan stunting.

### **1. Mengintegrasikan Rencana Kegiatan OPD dalam Rencana Anggaran Tahunan Kota Dumai**

Seperti disebutkan diatas, dalam rangka memastikan tujuan percepatan penurunan stunting terintegrasi sesuai target tahun 2022 menjadi 19,37 % dilakukan serangkaian kegiatan dengan menandai anggaran stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta penambahan pagu anggaran yang diperlukan sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021 yaitu intervensi terdiri dari spesifik dan sensitif. Maka pada tahun 2022 alokasi anggaran KotaDumai untuk intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi terdiri dari 8 perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PU / Cipta Karya, Dinas Perkim, Bapelitbang, Dinas Kominfo, Dinas Pengendalian Penduduk dan Kb, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Ketahanan Pangan, Kemenag sebesar Rp. 20,583,642,579,-.

Anggaran spesifik berjumlah Rp. 212,673,300,- dan anggaran sensitif berjumlah Rp. 20,370,969,279-, dengan adanya dukungan anggaran Kelurahan berjumlah Rp. 500,524,000,- berupa pemberian makanan tambahan di posyandu.

Nomenklatur urusan/ uraian kegiatan, sumber anggaran, nama perangkat daerah penanggungjawab, dan realisasinya sampai dengan Juni 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini :

## LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

OPD	APBD	APBN	DAK	DAK NON-FISIK	BANKEU PROV
DINKES	212.673.300				
DPPKB	495.895.400	979.997.780	-	50.000.000	-
DISNAKAN	147.030.119	-	-	-	-
KETAPANG	606.576.000,00	-	-	-	-
DINAS PU / CIPTA KARYA	12.439.246.000	12.142.936.000			
DISPERKIMTAN	1.039.000.000	-	-	-	13.200.000.000,00
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	559.950.000				
BAPPEDALITBANG	65.563.000				
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	175.000.000				
DISKOMINFOTIKSAN	299.263.680				
DPPPA	49.993.300				
KEMENAG	-	138.000.000			
KECAMATAN	500.524.000				
<b>TOTAL</b>	<b>16.590.714.799</b>	<b>13.260.933.780</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>13.200.000.000</b>

## **2. Pengembangan Sistem Monev terpadu untuk Penyediaan Data Capaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting di Kota Dumai**

Monitoring dan evaluasi (Monitoring dan evaluasi) kegiatan untuk menilai secara komprehensif rancangan program/kegiatan, konteks, ketepatan pelaksanaan, serta keberhasilan pencapaian keluaran dan dampak dari program/kegiatan. Berdasarkan Timeline schedule yang dilaksanakan Januari sampai Juni 2023, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Dumai adalah Penguatan Kelembagaan, Identifikasi dan Pengumpulan Dokumen Perencanaan Daerah, Pelaksanaan RAN PASTI dari AKSI 1 - AKSI 5, Pengumpulan Data Program/Kegiatan dan Anggaran dari OPD terkait di tingkat Kota sampai dengan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (Adanya monev dan pelaporan kegiatan audit stunting, Adanya monev dan pelaporan kegiatan pendampingan keluarga resiko stunting) telah terlaksana.

## **3. Merealisasikan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Setiap Bidang di TPPS**

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Perpres 72 Tahun 2021 Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

1. Menurunkan prevalensi Stunting;  
Angka Prevalensi Stunting Kota Dumai tahun 2022 sebesar 12,8% dan sudah mencapai target provinsi dan pusat menurun pada tahun 2024 sebesar 13%.
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;  
Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Dumai berkomitmen mewujudkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) agar meningkatkan sumber daya manusia berkualitas di Kota Dumai.
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;  
Pemenuhan asupan gizi meliputi *gizi* selama kehamilan dan masa kanak-kanak hingga usia dua tahun harus tercukupi. Kesehatan ibu hamil dan anak harus tercukupi sehingga ibu hamil dapat melahirkan anak yang sehat dan cerdas sedangkan anak yang cukup pemenuhan gizinya akan berkembang pertumbuhannya bukan pada tingginya saja tapi juga pertumbuhan otaknya. Dengan menjamin pemenuhan gizi diharapkan menjadi intervensi yang tepat bagi penanganan stunting di kota Dumai.
4. Memperbaiki pola asuh;  
Tak dapat di pungkiri pola asuh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

stunting, maka dari itu pola pengasuhan orang tua ke anak harus diperbaiki sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kota Dumai. Dengan pola asuh yang tepat maka akan menghindarkan anak-anak beresiko stunting disertai dengan pemahaman orang tua yang tepat dalam pengasuhan anak dan penyediaan gizi seimbang untuk anaknya.

5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

Salah satu upaya meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) adalah melalui pembangunan peningkatan sarana, prasarana dan alat pelayanan Kesehatan. Sarana prasarana dan alat pelayanan Kesehatan yang memadai dapat menunjang percepatan penurunan stunting di Kota Dumai.

6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kota Dumai untuk mendorong terwujudnya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) salah satunya yaitu Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta berkelanjutan Bagi Semua. Untuk itu Pemerintah Kota Dumai telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga 0% pada akhir tahun 2024. Tak bisa dipungkiri, akses air minum dan sanitasi memberi dampak pada stunting yang ada di kota Dumai sehingga ini menjadi focus dalam penanganan stunting.

Untuk menjamin efektivitas intervensi spesifik yang dalam menurunkan stunting, beberapa penajaman perlu dilakukan di antaranya:

1. Peningkatan cakupan, ketepatan sasaran, dan kepatuhan (compliance) konsumsi untuk intervensi pemberian makanan tambahan dan obat gizi, melalui penguatan pemantauan dan evaluasi serta pendampingan pada tingkat sasaran prioritas,
2. Penyusunan pesan kunci komunikasi perubahan perilaku yang sama bagi kader (kader Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kader Pembangunan Manusia), pendamping desa dan fasilitator masyarakat, petugas (perangkat desa, pemerintah daerah, petugas kesehatan puskesmas), dan diintegrasikan ke dalam modul edukasi yang sudah ada di K/L lain seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial,

3. Penjaminan kualitas pelaksanaan intervensi penurunan stunting juga harus didukung oleh standar paket intervensi di puskesmas dan posyandu, standar pemantauan pertumbuhan, dan panduan untuk setiap intervensi spesifik. Intervensi sensitif menyoroti penyebab tidak langsung stunting dan ditujukan untuk sasaran keluarga dan masyarakat umum yang utamanya mencakup: (a) peningkatan akses pangan bergizi; (b) peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan (d) peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

Untuk meningkatkan daya ungkit intervensi sensitif terhadap penurunan prevalensi stunting, intervensi harus diarahkan untuk diprioritaskan pada lokasi fokus penanganan stunting dan menyoroti kelompok sasaran prioritas mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, anak bawah dua tahun (baduta), ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita). Beberapa penajaman yang perlu dilakukan untuk intervensi sensitif antara lain:

- a. Penambahan variasi bantuan sosial pangan mencakup beras, telur, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), dan beras terfortifikasi serta menyoroti rumah tangga miskin 1.000 HPK,
- b. Peningkatan pengetahuan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait pencegahan stunting dan pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk keluarga penerima manfaat dengan modul kesehatan dan gizi,
- c. Pelatihan pencegahan stunting bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelas pengasuhan di PAUD, dan stimulasi dini bagi anak usia 0-2 tahun, dan
- d. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi dengan fokus pada rumah tangga 1.000 HPK di kelurahan lokasi prioritas penanganan stunting

**Realisasi Capaian Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kota Dumai**

Kemajuan pelaksanaan Program / Kegiatan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, yang terdiri dari:

## 1. Aksi Konvergensi sekrang-kurangnya aksi # 1 - 5

No	Uraian Aksi	Status Pelaksanaan Per Juni 2023	Status Pelaporan di Webmonev Bangda Per Juni 2023
1	Penyusunan Data-data Master Ansit	Selesai	Selesai
2	Aksi # 1 - Analisis Situasi	Selesai	Selesai
3	Aksi # 2 - Penyusunan Program Kegiatan	Selesai	Selesai
4	Aksi # 3 - Rembug Stunting	Selesai	Selesai
5	Aksi #4 – Penyusunan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting	Selesai	Selesai
5	Aksi #5 Pembinaan KPM	Selesai	Selesai

## 2. Kegiatan Rekonsiliasi dan Forum Koordinasi TPPS Kota Dumai

No	Uraian Kegiatan	Status Capaian Per Juni 2023
1	Rekonsiliasi	Selesai
2	Forum Koordinasi TPPS	Selesai

## 3. Kegiatan Audit Kasus Stunting.

No	Tahapan Kegiatan Audit Kasus Stunting (AKS)	Status Per Juni 2023	Output
1	Pembentukan TIM Audit*	Sudah terlaksana	SK Tim AKS
2	Verifikasi/validasi dan integrasi data (PK 22 dan ePPGBM) serta pengukuran kembali kepada kelompok sasaran	Sudah terlaksana	Data setiap kelompok sasaran yang akan dilakukan audit <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Catin;</li> <li>■ Bumil 3</li> <li>■ Busui</li> <li>■ Baduta/Balita</li> </ul>
3	Pembahasan dan Analisis hasil pengukuran dari lapangan antara Tim Teknis dengan Tim Pakar	Sudah terlaksana	Diperolehnya analisis dan rekomendasi dari Tim Pakar
4	Desiminasi dan Rencana Tindak Lanjut	Sudah terlaksana/	Adanya Rencana tindaklanjut tata laksana berupa intervensi program / kegiatan
5	Laporan hasil AKS	belum terlaksana	Tersusunnya laporan AKS kota dan status penyampaian laporan kepada TPPS Provinsi

Tabel Rekapitulasi Keluarga Berisiko dan atau Anak Stunting yang di Audit Kasus Stunting ke-I

KECAMATAN	CATIN	BUMIL	BUFAS	BADUTA
DUMAI BARAT	3	4	1	12
DUMAI TIMUR	1	3	1	6
BUKIT KAPUR	2	2	0	8
TOTAL	6	9	2	26

Keterangan : Data AKS Semester I

## 4. Mini Lokakarya kecamatan (jumlah kecamatan yang sudah melaksanakan minilok)

No	Nama Kecamatan	Target Minilok dalam 1 tahun	Jumlah Minilok yang sudah dilaksanakan per Juni 2023	Target Penyelesaian Minilok
1	Bukit Kapur	10 kali	3 kali	Ditargetkan bulan Desember sudah selesai
2	Medang Kampai	10 kali	3 kali	Ditargetkan bulan Desember sudah selesai
3	Sungai Sembilan	10 kali	3 kali	Ditargetkan bulan Desember sudah selesai
4	Dumai Barat	10 kali	3 kali	Ditargetkan bulan Desember sudah selesai
5	Dumai Timur	10 kali	3 kali	Ditargetkan bulan Desember sudah selesai
6	Dumai Kota	10 kali	3 kali	Ditargetkan bulan Desember sudah selesai
7	Dumai Selatan	10 kali	3 kali	Ditargetkan bulan Desember sudah selesai

## 5. Kegiatan Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2022

KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING
DUMAI BARAT	Pangkalan Sesai	2.346	469
PURNAMA	Purnama	4.052	698
PURNAMA	Bagan Keladi	1.552	274
DUMAI BARAT	Simpang Tetap Darul Ihsan	2.327	358
JAYAMUKTI	Teluk Binjai	3.680	416
JAYAMUKTI	Tanjung Palas	3.048	318
JAYAMUKTI	Jaya Mukti	4.927	562
JAYAMUKTI	Buluh Kasap	1.512	149
JAYAMUKTI	Bukit Batrem	2.913	729
BUKIT KAPUR	Bukit Nenas	2.017	388
BUKIT KAYU KAPUR	Bukit Kayu Kapur	1.523	365
BUKIT KAYU KAPUR	Gurun Panjang	1.142	416
BUKIT KAPUR	Bagan Besar	2.042	632
BUKIT KAYU KAPUR	Kampung Baru	1.791	333
BUKIT KAPUR	Bagan Besar Timur	1.498	346
BUKIT KAPUR	Bukit Kapur	2.155	332

## LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

SUNGAI SEMBILAN	Lubuk Gaung	2.556	494
SUNGAI SEMBILAN	Tanjung Penyembal	2.315	284
SUNGAI SEMBILAN	Bangsai Aceh	1.392	409
SUNGAI SEMBILAN	Basilam Baru	1.214	363
SUNGAI SEMBILAN	Batu Teritip	849	357
SUNGAI SEMBILAN	Sungai Geniot	1.293	509
MEDANG KAMPAI	Teluk Makmur	1.120	186
MEDANG KAMPAI	Mundam	912	159
MEDANG KAMPAI	Guntung	512	67
MEDANG KAMPAI	Pelintung	1.399	175
DUMAI KOTA	Laksamana	684	149
DUMAI KOTA	Rimba Sekampung	2.870	191
DUMAI KOTA	Dumai Kota	1.519	124
DUMAI KOTA	Bintan	1.155	206
DUMAI KOTA	Sukajadi	2.098	113
BUMI AYU	Ratu Sima	2.422	510
BUKIT TIMAH	Bukit Timah	1.891	318
BUKIT TIMAH	Mekar Sari	1.687	316
BUMI AYU	Bukit Datuk	2.487	513
BUMI AYU	Bumi Ayu	2.382	627

*Keterangan : Pendataan Keluarga 2022*

## 6. Kegiatan Pemantauan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDAMPINGAN											JLH
		CATIN		KELUARGA BERESIKO						BALITA (0-59 BULAN)			
				IBU HAMIL				IBU PASCA SALIN	(0-23 BLN)	(24-59 BLN)			
		I	II	I	II	III	IV				V	VI	
1	LAKSAMANA	3	3	12	10	10	1	0	2	9	3	17	20
2	RIMBA SEKAMPUNG	2	0	15	14	10	4	4	2	16	57	51	108
3	DUMAI KOTA	3	2	12	11	9	4	0	0	12	32	61	93
4	BINTAN	0	0	16	9	3	2	2	0	16	8	26	34
5	SUKAJADI	5	5	23	15	5	6	3	5	19	11	23	34
6	TELUK MAKMUR	1	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
7	MUNDAM	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
8	GUNTUNG	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
9	PELINTUNG	4	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0
10	LUBUK GAUNG	6	0	31	19	0	4	0	0	16	20	11	31
11	TANJUNG PENYEMBAL	10	0	20	14	13	12	8	12	27	17	3	20
12	BANGSAL ACEH	3	0	7	6	3	1	0	0	12	0	0	0
13	BASILAM BARU	2	2	15	9	0	0	0	1	15	4	18	22
14	BATU TERITIP	1	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15	SUNGAI GENIOT	1	0	45	22	0	0	0	7	19	12	7	19
16	PANGKALAN SESAI	4	2	35	15	11	0	0	0	22	11	1	12
17	PURNAMA	3	1	37	20	22	0	0	0	14	24	2	26
18	BAGAN KELADI	2	1	32	29	8	0	0	0	18	11	3	14
19	STDI	3	3	17	10	10	0	0	0	5	17	5	22
20	BUKIT NENAS	9	0	24	16	2	4	5	2	22	21	0	21
21	BUKIT KAYU KAPUR	3	3	28	10	5	0	0	0	35	0	0	0
22	GURUN PANJANG	0	0	35	23	19	4	0	0	34	5	0	5
23	BAGAN BESAR	0	0	13	10	5	6	1	4	31	18	0	18
24	KAMPUNG BARU	2	0	5	37	7	16	5	22	29	53	0	53

LAPORAN TPPS KOTA DUMAI SEMESTER 1 TAHUN 2023

25	BUKIT KAPUR	5	3	12	9	4	0	0	0	14	2	0	2
26	BAGAN BESAR TIMUR	1	0	9	0	5	8	10	5	22	6	7	13
27	TELUK BINJAI	4	1	32	16	9	10	5	9	45	53	11	64
28	TANJUNG PALAS	7	5	19	7	3	5	5	11	27	39	20	59
29	JAYA MUKTI	8	3	31	23	14	10	10	19	63	84	6	90
30	BULUH KASAP	0	0	9	15	3	0	0	1	12	8	1	9
31	BUKIT BATREM	5	1	24	10	4	5	4	5	21	29	15	44
32	RATU SIMA	2	0	34	19	11	0	0	0	31	55	56	111
33	BUKIT TIMAH	4	17	14	14	9	0	0	0	12	64	15	79
34	MEKAR SARI	8	5	36	26	12	0	0	0	16	113	132	245
35	BUKIT DATUK	0	0	45	9	7	0	0	0	18	97	82	179
36	BUMI AYU	4	0	33	8	5	0	0	0	58	80	67	147
JUMLAH		118	57	747	455	228	102	62	107	726	954	640	1594

## PROGRAM INOVASI DI KOTA DUMAI

Stunting merupakan salah satu permasalahan malnutrisi yang berdampak pada kegagalan pertumbuhan dan dapat berhubungan dengan perkembangan anak pola asuh dan ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kejadian untuk mengurangi kejadian stunting membutuhkan perubahan paradigma dari intervensi yang hanya berfokus pada bayi dan anak-anak yang menjadi sasaran kepada keluarga yang beresiko stunting berdasarkan data ssgi angka stunting di Kota Dumai terjadi penurunan yang signifikan yaitu tahun 2021 sebesar 23% menjadi 12,8% pada Tahun 2022 keberhasilan ini dilakukan dengan edukasi agar dapat mengubah perilaku yang biasa mengarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga beresiko stunting dengan inovasi menjadi salah satu instrumen penting dalam Upaya mempercepat penurunan kasus stunting di Indonesia dengan inovasi pula diharapkan ada langkah-langkah improvement atau pembedahan untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada berbicara inovasi merupakan ide atau gagasan kreatif dan orisinal yang kemudian diimplementasikan dalam rangka Memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan angka stunting salah satunya adanya kerjasama beberapa stakeholder baik pemerintah maupun swasta dengan dibentuknya inovasi-inovasi dari OPD yang ternaung dalam TPPS Kota Dumai yang dibuat di Kota Dumai diantaranya yaitu :

1. **BASKARA** (Bapak Asuh Anak Stunting Keluarga Sejahtera) Dan **MARI BERGEGAS** (Memberikan Makanan Bergizi bagi Keluarga Stunting) dengan jenis bantuannya telur beras dan vitamin untuk keluarga beresiko stunting dengan tujuan meningkatkan status gizi bagi keluarga beresiko yaitu anak stunting, cacin, bumil dan bufas serta meningkatkan pengetahuannya waktu pemberiannya selama 6 bulan dengan manfaat membantu meningkatkan kebutuhan makanan bagi keluarga serta menambah wawasan pengetahuan keluarga dalam pola asuh dan meningkatkan perekonomian keluarga,
2. **GAZING** (Gazebo infaq Stunting) suatu wadah pemberian makanan melalui Dahsyat dapur sehat atasi stunting diperoleh dari sumbangan masyarakat dimanfaatkan sebagai wadah pertemuan pemberian PMT bagi keluarga beresiko stunting dengan pemberian makanan bergizi dari infaq, kelompok perwira dari kelompok dasa wisma.

**3. PELITA BERANTING (PEduLI kiTA BERANtas stunTING):**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Forum Masyarakat Pelita Beranting;
- b. dilaksanakan dengan tujuan membantu Pemerintah Kota Dumai dalam meningkatkan efektifitas peran masyarakat sebagai upaya percepatan penanganan stunting di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bukit Kapur Kota Dumai;
- c. manfaat yang diperoleh:
  1. memastikan remaja putri sudah mengkonsumsi tablet tambah darah 1 (satu) tablet per minggu, dengan memantau Kartu Kepatuhan Minum Obat, serta memastikan remaja putri tersebut sudah menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
  2. mendorong orang tua agar membekali anak sekolah dengan bekal makanan sehat seimbang sesuai ISI PIRINGKU;
  3. memastikan Calon Pengantin sudah menerima Tablet Tambah Darah (TTD) dan mengkonsumsinya 1 (satu) tablet/minggu, memastikan calon pengantin sudah melakukan pemeriksaan kesehatan ke tenaga kesehatan sebagai bagian dari layanan pra nikah serta memastikan calon pengantin sudah menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga) bulan pra nikah;
  4. memastikan ibu hamil memeriksakan kehamilan secara lengkap sebanyak 6 (enam) kali pemeriksaan ke tenaga kesehatan) selama kehamilan, memastikan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat asupan gizi dan ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) selama 9 (sembilan) bulan kehamilan sejumlah 90 (sembilan puluh) tablet;
  5. mendorong Ibu bayi yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan untuk tetap memberikan ASI secara eksklusif, dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan mendapat Makanan Pendamping ASI sesuai pedoman Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) serta balita mendapat imunisasi dasar lengkap;
  6. mendorong ibu balita agar selalu ke posyandu memantau pertumbuhan dan perkembangan balita;
  7. memastikan Balita dengan Status Gizi Kurang dan Gizi Buruk (Wasting) serta Balita dengan Status Gizi Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) sudah mendapat Tata Laksana Gizi sesuai ketentuan;
- d. waktu uji coba pada Tahun 2023 sampai dengan 2024; dan
- e. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

**4. KATA BABA (Kader cinTA BAyi dan BALita).**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jaya Mukti Kota Dumai;
- b. dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran ibu bawah lima tahun (balita) akan pentingnya datang ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sehingga dapat meningkatkan kunjungan Posyandu, meningkatkan cakupan imunisasi, deteksi dini cegah stunting, terpantaunya tumbuh kembang balita dan menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara kader dan ibu balita;
- c. manfaat yang diperoleh:
  1. melakukan sweeping ke rumah-rumah balita, hal ini dilakukan jika balita tidak datang ke Posyandu;
  2. memantau tumbuh kembang balita, serta mengidentifikasi penyebab balita tidak datang ke Posyandu; dan
  3. pemberian bingkisan menarik, bagi balita yang datang ke Posyandu yang diberikan berupa kudapan atau cemilan untuk balita, sehingga balita menjadi senang dan bersemangat untuk datang ke Posyandu.
- d. waktu uji coba pada Tahun 2023 sampai dengan 2024; dan
- e. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**5. CHATMIL (CHATting ibu haMIL).**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jaya Mukti Kota Dumai;
- b. dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kesehatan yang diperlukan selama kehamilan, saat melahirkan dan masa pasca persalinan, dan juga mengurangi angka kematian ibu dan anak;
- c. manfaat yang diperoleh:
  1. kader dapat membuat grup obrolan dalam aplikasi whatsapp;
  2. kader dapat mengundang ibu hamil yang ada di wilayah kerja Posyandu untuk bergabung dalam grup whatsapp;
  3. kader melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil dengan cara chatting di dalam grup, misalnya menanyakan kondisi ibu hamil saat ini
  4. kader memberikan edukasi dan menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan oleh ibu hamil, seperti menyampaikan jadwal kelas bumil, dan

5. ibu hamil dapat saling melakukan sharing mengenai pengalaman mereka selama kehamilan, persalinan dan lain-lain; waktu uji coba pada Tahun 2023 sampai dengan 2024; dan
- d. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seseuni dengan kemampuan keuangan daerah.

**6. KAWASAN KEPITING (KAWASAN KEnali PEduLi stunTING).**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dumai Barat Kota Dumai mulai dari kader, Rukun Tetangga, Kelurahan, Kecamatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, KantOr Urusan Agama, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, Dinas Perikanan Kota Dumai, tenaga kesehatan, sekolah dan masyarakat.
- b. dilaksanakan dengan tujuan menurunkan angka stunting:
- c. manfaat yang diperoleh:
  1. dapat dilaksanakannya Langit Remaja (penanggulangan stunting oleh remaja) dengan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri oleh PKPR,
  2. pemberian kartu pintar ke calon pengantin yang telah mendapatkan tablet tambah darah dan mengikuti konseling pra nikah;
  3. dapat memantau konsumsi tablet tambah darah dan nutrisi pada saat kelas ibu hamil terutama ibu hamil yang risiko tinggi dan memastikan ibu hamil untuk selalu melakukan ANC secara lengkap,
  4. dapat dilaksanakannya pemberian PMT lokal pada bayi dan balita yang menderita pendek dan sangat pendek;
  5. dapat dilaksanakannya pemberian bahan makanan berupa 1 (satu) papan 1 (satu) telur oleh tim peduli,
  6. dapat dilaksanakannya pemantauan status gizi dilakukan sebulan sekali oleh petugas puskesmas di posyandu balita masing-masing dan
  7. dapat dilaksanakannya evaluasi tumbuh kembang balita dilakukan oleh petugas Puskesmas tiap triwulan;
- d. waktu uji coba pada Tahun 2023 sampai dengan 2024; dan e. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

### **7. One Day One Egg (Satu Hari Satu Butir Telur).**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Sembilan Kota Dumai;
- b. dilaksanakan dengan tujuan penurunan dan pencegahan kasus stunting di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Sembilan Kota Dumai;
- c. manfaat yang diperoleh:
  1. dapat dilakukannya skrining dan pelacakan kasus di wilayah kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Sembilan Koat Dumai;
  2. dapat dilaksanakannya koordinasi lintas profesi medis dalam tata laksana bagi anak yang di temukan masalah gizi;
  3. dapat dilakukan pemberian telur (one day one egg) pada anak stunting; dan
  4. dapat dilakukannya pemantauan BB/TB 1 bulan sekali pada anak stunting,
- d. coba pada Tahun 2023 sampai dengan 2024; dan
- e. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendetapan dan Belanja Daerah seseuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **8. PERIAS (Perkumpulan pERwiritan pedull Atasi Stunting)..**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bukit Timah Kota Dumai;
- b. dilaksanakan dengan tujuan melakukan pengumpulan dana dan uang tersebut akan di kelola untuk PMT anak stunting;
- c. manfaat yang diperoleh:
  1. terlaksananya pengumpulan Dana swadaya masyarakat; dan
  2. dapat dilaksanakannya pmberian PMT terhadap balita stunting;
- d. uji coba pada Tahun 2023 sampai dengan 2024; dan e. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendetapan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **9. KOMUNITAS SIGAP STUNTING (KOMUNITAS aksi ceGAH dan Penanggulangan Stunting).**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Purnama Kota Dumai;
- b. dilaksanakan dengan tujuan menurunkan angka kejadian stunting diwilayah kerja;
- c. manfaat yang diperoleh:
  1. dapat diberikannya tablet tambah darah kepada remaja putri oleh petugas puskesmas sekali seminggu;

2. dapat diberikannya sertifikat ke calon pengantin yang telah mendapatkan tablet tambah darah dan mengikuti konseling pra nikah;
  3. dapat dilakukan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada saat kelas ibu hamil terutama ibu hamil yang risiko tinggi dan memastikan ibu hamil untuk selalu melakukan ANC secara lengkap;
  4. dapat dirikannya PMT lokal pada bayi dan balita yang menderita pendek dan sangat pendek:
  5. dapat diberikannya bahan makanan berupa 1 (satu) papan 1 (satu) telur oleh RELAWAN;
  6. dapat dipantau status gizi dilakukan sebulan sekali oleh petugas puskesmas di posyandu balita masing-masing: dan
  7. terlaksananya evaluasi tumbuh kembang balita dilakukan oleh petugas puskesmas pertriwulan;
- d. waktu uji coba pada Tahun 2023 sampai dengan 2024; dan e. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seseual dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **10. YANDU CATIN (PelaYANan terpaDU CAIon penganTIN).**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dumal Kota Kota Dumal;
- b. dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan akses dan pengetahuan calon pengantin (catin) tentang persiapan pernikahan;
- c. manfaat yang diperoleh:
  1. dapat diberikan KIE Kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin di luar gedung (KUA dan lembaga agama lainnya sesuai jadwal yang telah ditentukan):
  2. dapat diberikan KIE Kesehatan Reproduksi dan seksual bagi calon pengantin di dalam gedung, dan
  3. dapat diberikannya buku pedoman calon pengantin dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak secara dini;
- d. waktu uji coba pada Tahun 2023 sampal dengan 2024; dan
- e. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**11. SI DARA MANIS (Remaja Putri KonsumSI Tablet Tambah DArAh Mencegah Anemia secara Gratis).**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dumai Kota Kota Dumai;
- b. dilaksanakan dengan tujuan memotivasi dan mendorong rematri di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madarsah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SM)/Sekolah Menengah Keujuran (SMK) di wilayah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Medang Kampai Koat Dumai untuk dapat minum Tablet Tambah Darah secara Rutin;
- c. manfaat yang diperoleh:
  1. terlaksananya pemeriksaan HB pada Remaja Putri;
  2. terlaksananya penyuluhan; dan 3. terlaksanya minum Tablet Tambah Darah bersama;
- d. waktu uji coba pada Tahun 2023 sampai dengan 2024; dan
- e. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**12. RAMAI CERITA (Remaja duMAI CERdas ceria Tanpa Anemia).**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dumai;
- b. dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan pesan melalui flashmop kepada remaja putri dikota Dumai serta meningkatkan minat remaja putri untuk mengkomsumsi Tablet Tambah Darah;
- c. manfaat yang diperoleh adalah dapat ditampilkannya Flashmop Anemia di setiap moment kegiatan untuk sosialisasi serta menerapkan Aksi Bergizi secara rutin di setiap event kesehatan baik di sekolah maupun diluar sekolah;
- d. waktu uji coba pada Tahun 2023-2024; dan e. anggaran dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seseual dengan kemampuan keuangan daerah.

**13. Buku Resep PMT Lokal Dapur Bergizi Pelita Beranting.**

- a. rancang bangun dan pokok perubahan dilaksanakan oleh Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga dan Persatuan Ahli Gizi Kota Dumai;
- b. dilaksanakan dengan tujuan menjadi referensi dalam pengolahan makanan tinggi protein sesuai kebutuhan gizi bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang, yang berasal dari bahan pangan yang tersedia dan mudah di peroleh di wilayah setempat dengan harga terjangkau;

- c. manfaat yang diperoleh adalah tersedianya referensi kebutuhan gizi bagi ibu hamil KEK dan balita gizi buruk dan gizi kurang
- d. waktu uji coba pada Tahun 2023 sampai dengan 2024; dan
- e. anggaran dianggarkan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

#### **14. Budikdamber (Budidaya Ikan dalam Ember)**

stimulan diberikan kepada keluarga beresiko stunting dalam meningkatkan perekonomian keluarga dengan pelatihan. Bagaimana membudidayakan ikan lele di dalam ember dan akan dikembangkan di rumah setidaknya dapat dimanfaatkan samping kala konsumsi makanan yang tinggi protein.

### **KESIMPULAN**

Keberhasilan dalam penanganan percepatan penurunan angka stunting akan terwujud bilamana didukung dari semua unsur stakeholder terkait dan kelompok pentahelix. Konvergensi tidak hanya ditataran konsep akan tetapi diwujudkan dalam program dan kegiatan nyata bagi masyarakat.

Lampiran :

**PRAKTIK BAIK 01 DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)**



(Peresmian Dapur DAHSAT oleh DPPKB dan BKKBN)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**PRAKTIK BAIK 02 PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING KELUARGA SEJAHTERA (BASKARA)**



[LINK VIDEO](#)

[BASKARA](#)

**PRAKTIK BAIK**

03

**PEMBERIAN PMBA KEGIATAN GIZI MASYARAKAT**

**DINAS KESEHATAN**



**ASISTENSI PENGUKURAN BALITA STUNTING**



**PRAKTIK BAIK**

04

**PENYUSUNAN BUKU RESEP PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN LOKAL**

**TIM PENGGERAK PKK DAN PERSATUAN AHLI GIZI (PERSAGI)  
KOTA DUMAI**



Tujuan Menjadi Referensi dalam pengolahan makanan tinggi protein sesuai kebutuhan gizi bagi ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang, yang berasal dari bahan pangan yang tersedia dan mudah di peroleh di wilayah setempat dengan harga terjangkau

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**PRAKTIK BAIK**

05

**GIAT PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PANGAN STUNTING**



LINK VIDEO

[GSP](#)



**PRAKTIK BAIK**

06

**KAMPANYE GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN (GEMARIKAN)**

Kegiatan Sosialisasi Gemarikan pada Tahun 2022 ini dilaksanakan pada bulan November bertepatan dengan Hari Ikan Nasional. Pelaksanaan kegiatan tersebut pada tanggal 28 November 2022 bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Dumai. Kejadiannya adalah peringatan hari ikan nasional dan pemberian makanan olahan ikan (Bakso Ikan, Kerupuk Atom, Cookies Ikan, Minuman Rumput Laut). Pemberian makanan olahan ikan diberikan kepada Anak TK yang berjumlah 80 orang, anak stunting 22 orang. Selain itu juga dilakukan pembagian Stiker Gemarikan ke rumah masyarakat.

DINAS PERIKANAN

LINK VIDEO

[PEMBERIAN BUDIKAMBER](#)



PEMBERIAN STIKER GEMARIKAN DI RUMAH MASYARAKAT KELUARGA BERSIKO STUNTING



PRODUK OLAHAN DARI IKAN UNTUK KELUARGA BERSIKO STUNTING



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

**PRAKTIK BAIK**

**07**

**KEGIATAN PENGEMBANGAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)**

[LINK VIDEO](#)



"Penyerahan bantuan bibit tanaman pangan dan bantuan penunjang lainnya kepada kelompok wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga beresiko stunting"

Pelatihan Hidroponik bagi kelompok Wanita Tani Keluarga Beresiko Stunting



**PRAKTIK BAIK**

**08**

**PENYELENGGARAAN BIMTEK KEGIATAN PENURUNAN STUNTING**

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PENANGANAN STUNTING BAGI GURU PAUD YANG DI IKUTI OLEH 100 PESERTA YANG DILAKSANAKAN PADA BULAN OKTOBER 2022 BERSAMA IBU HJ. LENI RAMANI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PELAKSANAAN PELATIHAN PROGRAM PAUD HI BAGI KEPALA SEKOLAH PAUD YANG DI IKUTI SEBANYAK 100 PESERTA YANG DILAKSANAKAN BULAN OKTOBER 2022 BERSAMA IBU HJ. LENI RAMANI



TURUN KE SEKOLAH PAUD DALAM HAL PEMBINAAN BUNDA PAUD DAN DINAS PENDIDIKAN TERHADAP PAUD YANG LOKUS STUNTING PADA TAHUN 2022 BERSAMA IBU HJ. LENI RAMANI

**PRAKTIK BAIK**

09

**RENOVASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KELUARGA BERESIKO STUNTING**

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**DOKUMENTASI RENOVASU RUMAH LAYAK HUNI 0% DAN 100% BAGI KELUARGA BERESIKO STUNTING**



**PRAKTIK BAIK**

10

**PENYALURAN ZAKAT BAZNAS ANAK STUNTING**



Bantuan Baznas langsung di salurkan oleh Ibu Hj. Leni Ramaini

Bantuan Baznas langsung di salurkan oleh Bapak H. Paisal,



**PRAKTIK BAIK**

11

**PROGRAM POLRES DUMAI PEDULI**



PEMBERIAN BANTUAN BERUPA SEMBAKO OLEH POLAIRUT SATUAN POLRES DUMAI DIDAMPINGI KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

**Cegah Stunting, Polres Dumai Laksanakan Program Polres Dumai Peduli**

Administrator  
22 November 2022 16:18:19 WIB

**AURA (DUMAI)** - Sebagai upaya untuk membantu pemerintah mencegah Stunting, Polres Dumai melaksanakan Program "Polres Dumai Peduli", (22/11).

Secara Langsung, Kapotes Dumai AKBP Nurhadi Ismanho, S.H, S. IK yang diwakili oleh Wakapotes Kompol Josina Lambombak, S.H, S. IK bersama jajaran mendatangi kediaman keluarga penerima manfaat.

"Pada hari ini, saya bersama jajaran polres Dumai beserta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai mendatangi enam keluarga yang menurut kami membutuhkan bantuan dari kami," Kata Wakapotes.

Dikesempatan yang sama, Polres Dumai menyerahkan beberapa bantuan berbentuk sembako, yang mana diharapkan dengan pemberian sembako ini, dapat mencukupi nutrisi dari penderita Stunting dan keluarga.

"Seperti kita ketahui bersama, penderita Stunting ini berasal dari kurangnya asupan nutrisi yang ia terima, oleh sebab itu kami berharap bantuan ini bisa membantu untuk mencukupi nutrisi mereka," Jelasnya.

Kegiatan Polres Dumai Peduli memang sering dilaksanakan oleh Polres dan jajarannya, diharapkan, bagi keluarga penerima manfaat dapat terolong untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

**PRAKTIK BAIK**

12

**PEMBERIAN BANTUAN BABINSA KEPADA ANAK STUNTING**



PEMBERIAN BANTUAN BERUPA SEMBAKO OLEH BABINSA DI KEC. MEDANG KAMPAI DAN KEC. BUKIT KAPUR

**PRAKTIK BAIK**

**13**

**GAZING DAN MADU PENTING KEC. DUMAI KOTA**

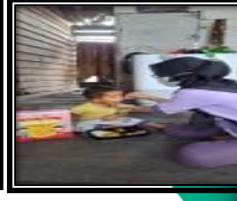
Program inovasi ini mempunyai tujuan utama menekan angka **stunting** dengan kelompok sasaran berisiko **stunting** yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu pasca salin dengan memberi bantuan oleh masyarakat

**Gazing (Gazebo/Infak Stunting)**  
 Gazing Gazebo/Infak Stunting adalah sebuah inovasi dari Kecamatan Dumai Kota dalam penanganan stunting yang ada di Kecamatan Dumai Kota. Bentuknya adalah infak masyarakat di kelurahan dan bantuan yang di salurkan kepada anak stunting yang ada di Kecamatan Dumai Kota.

**Madu Penting (Masyarakat Peduli Stunting)**  
 Gerakan mandiri masyarakat terhadap anak stunting yang di wilayahnya. Gerakan ini tidak mematok besaran bantuan kepada anak stunting. Bantuan yang di berikan berupa beras, telur dan susu.



PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK STUNTING DISERAHKAN OLEH BAPAK Drs. ELI KUSNAELI, MM. Pd



PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK STUNTING USIA 6-23 BULAN DI RT 06 S/D RT 07

**PRAKTIK BAIK**

**14**

**BANTUAN DARI PT. APICAL DAN PT. ELNUSA KEPADA ANAK STUNTING**



**AKSI 5 :  
PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA**



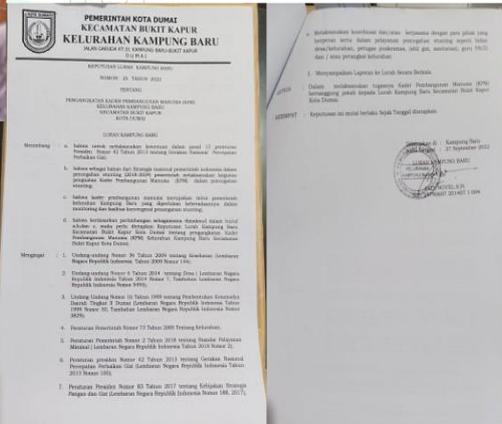
**Jumlah TPK sebanyak 432 orang, sedangkan Jumlah KPM 180 orang.**

**TPK dan KPM berkolaborasi mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan**

**KEGIATAN AKSI 5 :**

**Sosialisas Kader Pembangunan Manusia (KPM) oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bersama Ibu Hj. Leni Ramaini**

**SK KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) KELURAHAN**




BERANDA
PEMERINTAHAN
LAYANAN
BERITA
TRANSPARANSI
INFORMASI
PENGUMUMAN
KONTAK

Home > Berita > Rincian

## Komitmen Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, Wali Kota Minta Setiap OPD Bekerja Keras

Editor: Administrator

Senin, 19 Juni 2023 22:30 WIB. Dibaca 98 Kali

[WhatsApp](#)

[Facebook](#)



DISKOMINFOTIKSAN, DUMAI - Pemerintah Kota Dumai kali ini melaksanakan Rembuk Stunting dan Penandatanganan Komitmen dalam Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023. Pelaksanaan Rembuk Stunting dan Penandatanganan Komitmen ini dilaksanakan pada Ruang Pertemuan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Bappedalitbang), Senin (19/6/2023).

Rembuk Stunting dan Penandatanganan Komitmen ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka melaksanakan percepatan penurunan angka stunting. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si menyampaikan bahwa Kota Dumai merupakan salah satu daerah dengan penurunan angka stunting yang cukup signifikan.

Wali Kota Dumai H. Palsai, SKM, MARS meminta kepada seluruh kepala OPD se Kota Dumai agar bekerja keras dalam menuntaskan angka stunting. Beliau mengingatkan bahwa aksi penurunan angka stunting harus dilaksanakan dengan bersama sama dan memiliki tekad untuk penurunan tersebut.

"Penurunan angka stunting yang signifikan hanya bisa dilaksanakan apabila kerjasama para kepala OPD beserta stakeholder lainnya bisa terjalin dengan komitmen yang kuat. Kita targetkan stunting di Kota Dumai bisa secepatnya tuntas dan tumbuh kembang anak-anak kita berjalan dengan baik" terang H. Palsai.

Kegiatan pun dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Wali Kota Dumai, Sekdako Dumai, Kepala Bappedalitbang serta seluruh kepala OPD dan stakeholder yang hadir.

Ka. BKKBN Provinsi Riau pun memaparkan terkait langkah pencegahan serta aksi yang harus dilaksanakan agar penurunan angka stunting bisa digesa secepatnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah se Kota Dumai, serta hadirin lainnya.

Pengumuman
Agenda Hari Ini


Selasa, 16 Mei 2023 11:43 WIB. Dibaca 361 Kali  
**Pemberitahuan Perpindahan Layanan Dukcapil ke MPP**


Jumat, 12 Mei 2023 10:33 WIB. Dibaca 354 Kali  
**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022**


Minggu, 26 Maret 2023 12:40 WIB. Dibaca 1931 Kali  
**SERUAN BERSAMA WALIKOTA DUMAI, KEPOLISIAN RESOR DUMAI, KOMANDO DISTRIK MILITER 0320 DUMAI, KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA DUMAI**


Selasa, 24 Januari 2023 12:17 WIB. Dibaca 2379 Kali  
**PENGUMUMAN SELEKSI CALON KOMISARIS BUMD PT PEMBANGUNAN DUMAI (PERSERODA) KOTA DUMAI TAHUN 2023**

Semua Pengumuman



kominfo.dumai





kominfo.dumai



**PEMERINTAH KOTA DUMAI** BERANDA PEREMINTAHAN LAYANAN BERITA TRANSPARANSI INFORMASI PENGUMUMAN KONTAK

Home > Berita > Rincian

## Wali Kota Kembali Rangkul Masyarakat dalam Musrenbang dan Rembuk Stunting, Siap Wujudkan Infrastruktur yang Unggul dan Tanggulangi Stunting

Editor: Administrator

Selasa, 14 Februari 2023 21:53 WIB. Dibaca 136 Kali

WhatsApp

Facebook



DUMAI - Wali Kota Dumlai H. Palsal menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rembuk Stunting yang bertempat di Aula Kecamatan Dumlai Kota, Selasa (14/02).

Musrenbang yang bersamaan dengan kegiatan Rembuk Stunting tersebut bertujuan untuk membahas mengenai rencana pembangunan sekaligus mencari solusi-solusi permasalahan untuk Infrastruktur serta mengusulkan berbagai program yang akan dijalankan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat maupun Ketua RT setempat.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Dumlai H. Palsal menyampaikan bahwa agar semua data yang diberikan oleh Kelurahan untuk segera direalisasikan dan para Kepala OPD agar dapat memprosesnya.

"Semua data yang akan direalisasikan agar OPD dapat memprosesnya, untuk semua pelayanan yang ada di fasilitas umum sudah kami perbaiki untuk lebih baik, dan untuk pengurusan perekaman di Disdukcapli nanti akan kami letakan di pelayanan satu pintu yang saat ini bangunannya sedang dibangun," ucapnya

Bellau juga menjelaskan bahwa untuk pendidikan Pemerintah Kota Dumlai telah membuat bangunan sekolah dengan desain menarik yang nantinya akan bisa menjadi daya tarik dan Icon Kota Dumlai.

"Saat ini pembangunan sekolah yang telah kami gesa akan di desain dengan semenarik mungkin agar menjadi daya tarik dan Icon Kota Dumlai, untuk permasalahan stunting kami akan membuat rumah-rumah untuk warga yang kurang mampu, mohon dukungan dan kerjasamanya agar ini dapat terrealisasi dan masyarakat juga dapat menikmatinya," harapnya.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Forkopimda, Kepala OPD, Camat Dumlai Kota, Para Lurah, Para Ketua RT, Ketua LPMK, Tokoh Masyarakat dan Insan Pers.

Pengumuman Agenda Hari Ini

Selasa, 16 Mei 2023 11:43 WIB. Dibaca 368 Kali  
Pemberitahuan Perpindahan Layanan Dukcapli ke MPP

Jumat, 12 Mei 2023 18:33 WIB. Dibaca 377 Kali  
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022

Minggu, 26 Maret 2023 12:40 WIB. Dibaca 1533 Kali  
SERUAN BERSAMA WALKOTA DUMAI, KEPOLISIAN RESOR DUMAI, KOMANDO DISTRIK MILITER 0320 DUMAI, KEMENTERIAN AGAMA KOTA DUMAI DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA DUMAI

Selasa, 24 Januari 2023 12:17 WIB. Dibaca 2387 Kali  
PENGUMUMAN SELEKSI CALON KOMISARIS BUMD PT PEMBANGUNAN DUMAI (PERSERODA) KOTA DUMAI TAHUN 2023

Semua Pengumuman



#DumaiBerkhidmat





kominfo.dumai





kominfo.dumai





kominfo.dumai



4/6

